

Katalog: 4102004.15
ISSN 2715-4017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAMBI 2025

VOLUME 13, 2025

www.bps.jambi.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAMBI 2025

VOLUME 13, 2025

<https://jambi.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAMBI 2025

Volume 13, 2025

Katalog : 4102004.15
ISSN : 2715-4017
Nomor Publikasi : 15000.25056
Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm
Jumlah Halaman : xviii+95 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:

www.Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAMBI 2025

Volume 13, 2025

Pengarah : Agus Sudibyo

Penanggung Jawab : Sumarmi

Penyunting : Lisa Gusmanita

Penulis Naskah : Nur'aidah

Pengolah Data : Ni Kadek Suardani

: Rita Rif'ati

: Ani Dwi Nugraeni

: Sinta Bela

Pembuat Kover : Nur'aidah

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data perkembangan kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi antar waktu, perbandingan antar daerah tempat tinggal maupun jenis kelamin.

Data yang digunakan utamanya bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2024. Publikasi ini menyajikan aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman, isi publikasi ini ditampilkan dalam 8 (delapan) bab, yaitu Kependudukan; Kesehatan dan Gizi; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Taraf dan Pola Konsumsi; Perumahan dan Lingkungan; Kemiskinan; dan Sosial Lainnya.

Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jambi, Desember 2025
Kepala BPS Provinsi Jambi



Agus Sudibyo

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xiii
Singkatan dan Akronim	xv
Penjelasan Umum.....	xvii
 BAB 1 KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin	3
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan.....	6
1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama.....	8
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	10
BAB 2 KESEHATAN DAN GIZI	13
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	16
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita.....	20
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	23
BAB 3 PENDIDIKAN	25
3.1 Angka Melek Huruf.....	28
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	30
3.3 Tingkat Pendidikan.....	32
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	34
BAB 4 KETENAGAKERJAAN	39
4.1 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.....	42
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	44
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	46
4.4 Jumlah Jam Kerja	50
BAB 5 TARAF DAN POLA KONSUMSI	51
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	53
5.2 Gini Ratio.....	56
5.3. Konsumsi Kalori dan Protein.....	59

BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	61
6.1 Kondisi Fisik Rumah Tempat Tinggal.....	64
6.2 Kualitas Rumah Tempat Tinggal	65
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal	68
6.4 Fasilitas Rumah Tempat Tinggal	69
BAB 7 KEMISKINAN.....	75
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin.....	78
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	80
BAB 8 SOSIAL LAINNYA.....	85
8.1 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	87
8.2 Akses Terhadap Perlindungan Sosial.....	91
8.3 Tindak Kejahatan	92
Daftar Pustaka	95

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2024 dan 2025.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2025.....	5
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jambi, 2024 dan 2025.....	7
Tabel 1.4	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Jambi, 2024.....	9
Tabel 1.5	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Jambi, 2024.....	11
Tabel 1.6	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun Menurut Jenis Alat KB yang Digunakan di Provinsi Jambi, 2024.....	12
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	17
Tabel 2.2	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	17
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jumlah Hari Rawat Inap, dan Rata-rata Lama Rawat Inap (hari) di Provinsi Jambi, 2024.....	18
Tabel 2.4	Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 Provinsi Jambi dan Indonesia (tahun), 2020–2024.....	21
Tabel 2.5	Persentase Anak Usia Kurang dari Dua Tahun yang Pernah Diberi ASI Berdasarkan Lama Pemberian Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	21
Tabel 2.6	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Provinsi Jambi, 2024.....	22

Tabel 2.7	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Penolong Proses Persalinan Terakhir di Provinsi Jambi, 2024.....	24
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	29
Tabel 3.2	Konversi Tahun Lama Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	33
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	35
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	35
Tabel 3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	36
Tabel 3.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	37
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	43
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	44
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024...	45
Tabel 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024....	46

Tabel 4.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, 2022–2024.....	47
Tabel 4.6	Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	48
Tabel 4.7	Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024.....	49
Tabel 4.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja per Minggu di Provinsi Jambi, 2022–2024.....	50
Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Jambi (persen), 2023–2024.....	54
Tabel 5.2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Kelompok Pendapatan di Provinsi Jambi, 2019–2024.....	58
Tabel 5.3	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	59
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	64
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	66
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	67
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	68
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	69
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	70
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Jamban dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	71

Tabel 6.8	Percentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	72
Tabel 7.1	Perkembangan Jumlah dan Percentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2018–2025.....	79
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (rupiah), Maret 2018–Maret 2025.....	81
Tabel 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, Maret 2018–Maret 2025.....	82
Tabel 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, Maret 2018–Maret 2025.....	84
Tabel 8.1	Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah dan Memiliki Komputer/Laptop Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	88
Tabel 8.2	Percentase Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	89
Tabel 8.3	Percentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Seluler dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	90
Tabel 8.4	Percentase Penduduk yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alat yang digunakan untuk Mengakses Internet di Provinsi Jambi, 2024.....	90
Tabel 8.5	Percentase Rumah Tangga yang Masih Tercatat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pemanfaatan Bantuan di Provinsi Jambi, 2024.....	92
Tabel 8.6	Percentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	93

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Piramida Penduduk Provinsi Jambi (ribu jiwa), 2025.....	8
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025.....	32
Gambar 3.2	Kegiatan Belajar Mengajar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jambi.....	38
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024.....	55
Gambar 5.2	Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Jambi.....	56
Gambar 5.3	Tumpeng Gizi Seimbang Menurut Kementerian Kesehatan.....	60
Gambar 7.1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, 2018–2024.....	78

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

AHH	Angka Harapan Hidup
AKB	Angka Kematian Bayi
ABH	Angka Buta Huruf
AMH	Angka Melek Huruf
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BSM	Badan Pusat Statistik
GK	Garis Kemiskinan
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKBM	Garis Kemiskinan Bukan Makanan
KB	Keluarga Berencana
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Raskin	Beras Miskin
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional

TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TFR	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UKP	Umur Perkawinan Pertama
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>

https://jambi.bps.go.id

PENJELASAN UMUM

Penyajian data dalam publikasi ini menggunakan beberapa tanda. Berikut masing-masing penjelasannya.

Data tidak tersedia..... : ...

Tidak ada atau nol mutlak..... : -

Data tidak dapat ditampilkan (*Not Applicable*)..... : NA

BAB 1

KEPENDUDUKAN

<https://jambi.bps.go.id>



BAB 1

KEPENDUDUKAN

Bab Kependudukan ini mengulas secara deskriptif terkait kependudukan di Provinsi Jambi, di antaranya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta rasio jenis kelamin. Selain itu diuraikan persebaran, kepadatan penduduk, dan angka beban ketergantungan. Fenomena kependudukan yang lain adalah tentang usia perkawinan pertama wanita pernah kawin, fertilitas, serta penggunaan alat/cara keluarga berencana (KB) oleh wanita berusia 15–49 tahun pernah kawin di Provinsi Jambi.

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2025 sebanyak 3,77 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa selama 2020–2025 telah terjadi pertambahan penduduk sebanyak 220 ribu jiwa. Pada periode 2020–2024 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,30 persen, kemudian periode 2020–2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,28 persen.

Indikator kependudukan lainnya adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Angka ini dapat digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara berimbang. Dari 3,77 juta jiwa penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2025, terdapat sebanyak 1,91 juta jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 1,85 juta jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian, rasio jenis kelamin tahun 2025 sebesar 103,24.

yang berarti bahwa penduduk laki-laki Provinsi Jambi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Lebih tepatnya setiap 103 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 penduduk perempuan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2024 dan 2025

Rincian	Satuan	2024	2025
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-laki	jiwa	1.893.493	1.914.252
Perempuan	jiwa	1.830.791	1.854.230
Jumlah penduduk	jiwa	3.724.284	3.768.482
Laju pertumbuhan ¹	persen	1,30	1,28
Rasio jenis kelamin	persen	103,42	103,24

Catatan: ¹Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun berjalan (Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang ditempati penduduk. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah terhadap penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk setiap kilometer persegi di suatu wilayah berarti semakin tinggi kepadatan penduduknya. Kalau dihubungkan dengan dimensi sosial, semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk ada kecenderungan berbanding lurus dengan tingkat konflik sosial.

Pada tahun 2024 dengan luas wilayah 49.026,58 km² dan jumlah penduduk sebesar 3.724.284 jiwa, Provinsi Jambi memiliki kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa per km².

Pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk sebesar 3.768.482 jiwa, kepadatan penduduk mencapai 77 jiwa per km².

Hal ini menunjukkan bahwa selama setahun terakhir kepadatan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan meski tidak signifikan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2025

Kabupaten/ Kota	Penduduk		Laki-Laki dan Perempuan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Kerinci	129.459	128.749	258.208	3.445,20	74,95	100,55
Merangin	191.646	186.711	378.357	7.540,12	50,18	102,64
Sarolangun	156.026	152.653	310.679	5.935,89	52,34	103,52
Batang Hari	162.969	157.312	320.281	5.387,52	59,45	103,90
Muaro Jambi	220.547	209.699	430.246	5.225,80	82,33	105,17
Tanjung Jabung Timur	122.669	118.485	241.154	4.546,62	53,04	103,53
Tanjung Jabung Barat	174.418	165.207	339.625	5.546,06	61,24	105,58
Tebo	184.092	175.546	359.638	6.103,74	58,92	105,87
Bungo	196.287	187.316	386.114	4.760,83	81,10	103,4
Kota Jambi	322.847	319.417	642.264	169,89	3.780,54	101,07
Sungai Penuh	51.292	50.624	101.916	364,92	279,28	101,32
Provinsi Jambi	1.914.252	1.854.230	3.768.482	49.026,58	76,87	103,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

Persebaran penduduk Provinsi Jambi dapat dikatakan belum merata antarwilayah kabupaten/kota. Penduduk Provinsi Jambi lebih banyak tinggal di ibukota Provinsi Jambi, Kota Jambi dan sekitarnya. Hampir sepertiga dari total penduduk Provinsi Jambi berdomisili di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi lebih tepatnya sebesar 28 persen, selebihnya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya. Terkonsentrasi jumlah penduduk di Kota Jambi dan Muaro Jambi disebabkan oleh semakin meningkatnya fungsi Kota Jambi di samping sebagai ibukota provinsi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Persebaran penduduk yang tidak merata di Provinsi Jambi juga searah dengan kepadatan penduduk kabupaten/kota yang juga tidak seimbang. Kota Jambi memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni sebesar 3.780 jiwa/km², sedangkan kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kabupaten Merangin sebesar 50 jiwa/km².

Rendahnya kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin dikarenakan wilayah yang relatif lebih luas dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sementara jumlah penduduk hampir sama dengan kabupaten lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Merangin lebih sedikit dari penduduk Kota Jambi, sementara luas wilayahnya mencapai lebih dari 44 kali luas wilayah Kota Jambi.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan penduduk adalah perbandingan penduduk yang tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun). Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi.

Angka beban ketergantungan Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebesar 45,23 persen. Ini berarti setiap 100 jiwa penduduk produktif menanggung kebutuhan sekitar 45 hingga 46 jiwa penduduk yang tidak produktif secara ekonomi. Angka beban ketergantungan Provinsi Jambi terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jambi, 2024 dan 2025

Rincian	2024	2025
	[1]	[2]
Jumlah penduduk	3.724.284	3.768.482
0–14	943.461	946.226
15–64	2.567.410	2.594.837
65 tahun ke atas	213.413	227.419
Angka beban ketergantungan	45,06	45,23

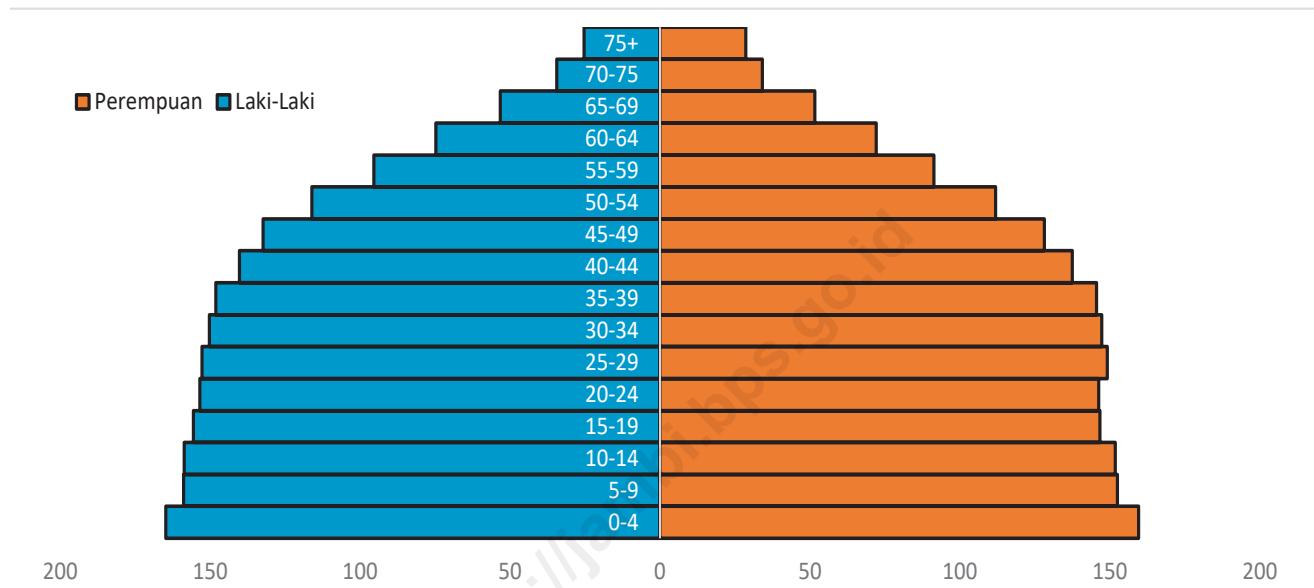
Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

Menurunnya angka beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk umur tidak produktif. Penurunan angka beban ketergantungan pada kisaran 40-an persen ini menurut para ahli demografi sebagai ciri-ciri terjadinya bonus demografi. Bonus demografi terjadi bila penduduk pada kelompok usia produktif sangat besar sementara kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia lanjut (lebih dari 65 tahun ke atas) semakin kecil.

Bonus demografi hanya terjadi satu kali dalam sejarah hidup suatu negara/bangsa. Bonus demografi merupakan momentum, yang apabila momentum tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal maka efeknya sangat besar, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Piramida penduduk Provinsi Jambi tahun 2025 memperlihatkan komposisi penduduk Provinsi Jambi didominasi oleh penduduk muda. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk ini adalah jumlah penduduk usia 20–29 tahun yang lebih kecil dibanding penduduk usia 10–19 tahun maupun penduduk yang berusia 0–9 tahun.

Ini menggambarkan bahwa pada periode 1995–2004, laju pertumbuhan penduduk relatif rendah. Namun pada akhir tahun 2004 hingga kini laju pertumbuhan lebih tinggi sehingga penduduk usia muda (0–9 tahun dan 10–19 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia dewasa (20–29 tahun). Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya, maka seharusnya jumlah penduduk usia 0–9 tahun lebih rendah dibandingkan penduduk usia di atasnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Provinsi Jambi (ribu jiwa), 2025

1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama didefinisikan sebagai umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Informasi mengenai usia perkawinan pertama diperlukan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Ini terkait dengan hubungan negatif antara usia perkawinan pertama dengan tingkat fertilitas, di mana semakin muda usia perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya dengan kata lain akan semakin banyak anak yang dilahirkan (fertilitas tinggi).

Pada tahun 2024, sebagian besar penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di Provinsi Jambi melakukan perkawinan pada usia di atas 21 tahun, mencapai 37,81 persen. Sementara untuk usia 10–16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertama usia tersebut mencapai 16,15 persen.

Masih besarnya persentase perempuan usia 10 tahun ke atas di Provinsi Jambi yang melakukan perkawinan pertama pada usia dini, tentu harus menjadi perhatian buat para pemangku kepentingan. Perlu dilakukan upaya dan tindakan pencegahan untuk membangun kesadaran bahwa perempuan yang melakukan perkawinan pada usia terlalu muda dapat meningkatkan risiko medis kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan anak.

Selain untuk mencegah risiko medis, peningkatan usia perkawinan pertama juga diperlukan untuk mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu, tidak hanya penyuluhan yang diperlukan, tetapi juga peningkatan pendidikan dan kesempatan kerja bagi kaum perempuan. Dengan tersedianya akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan, maka akan semakin banyak pilihan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan atau untuk bekerja selain untuk memilih menikah pada usia dini.

Tabel 1.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	≤ 16 Tahun	17–18 Tahun	19–20 Tahun	21+ Tahun	Total
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Perkotaan	11,35	15,48	23,60	49,58	100,00
Perdesaan	18,42	23,94	25,39	32,25	100,00
Perkotaan dan perdesaan	16,15	21,23	24,81	37,81	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia 21 tahun ke atas cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan yang tinggal di perdesaan, yaitu 49,58 persen berbanding 32,25 persen. Sementara untuk perempuan yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 21 tahun cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Bahkan untuk usia 16 tahun ke bawah persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertamanya di perdesaan 18,42 persen dan di perkotaan sebesar 11,35 persen.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Secara umum, tujuan diselenggarakannya program Keluarga Berencana (KB) yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat dengan mengendalikan angka kelahiran dan menjamin terkendalinya pertambahan jumlah penduduk. Sementara itu, tujuan khusus KB yaitu meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga dengan cara penjarangan kelahiran.

Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang hidup secara sehat dan sejahtera dengan membatasi angka kelahiran. Seperti diketahui dalam slogan BKKBN mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu dua anak lebih baik. Di sini terdapat perencanaan mengenai pembatasan jumlah keluarga dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi.

Tabel 1.5 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
Pernah menggunakan alat/cara KB	18,13	16,71	17,15
Sedang menggunakan alat/cara KB	56,63	64,37	61,97
Tidak pernah menggunakan alat/cara KB	25,23	18,92	20,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Persentase perempuan berumur 15–49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB di Provinsi Jambi mencapai 61 persen. Dimana persentase di perdesaan sebesar 64,37 persen lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang sebesar 56,63 persen. Sementara untuk perempuan berumur 15–49 tahun yang pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 17,11 persen dan yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 20,88 persen.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan untuk mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 1.6 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun Menurut Jenis Alat KB yang Digunakan di Provinsi Jambi, 2024

Rincian [1]	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
MOW/tubektomi	6,20	1,68	2,96
AKDR/IUD/spiral	9,59	2,69	4,65
Suntikan	48,35	57,30	54,76
Susuk KB	8,99	12,53	11,53
Pil	21,71	23,82	23,22
Kondom	3,38	1,01	1,68
Lainnya	0,79	0,53	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan risiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati, masing-masing mencapai 54,76 persen untuk suntikan dan 23,22 persen untuk pil. Sebaliknya alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah MOW/Tubektomi, kondom, dan lainnya, masing-masing persentasenya di bawah tiga persen. Sedangkan untuk penggunaan alat/cara KB yaitu susuk KB sebesar 11,53 persen dan AKDR/IUD/Spiral mencapai 4,65 persen.

BAB 2

KESEHATAN DAN

GIZI

<https://jambi.bps.go.id>



BAB 2

KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan, bahkan dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan anak, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan adalah skala yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan fungsi dan struktur jasmani mental sosial penduduk. Informasi mengenai derajat kesehatan sangat penting karena dapat digunakan untuk menilai status kesehatan suatu wilayah, membandingkan kondisi kesehatan antarwilayah, mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan, merencanakan dan mengimplementasikan program pelayanan kesehatan, serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Salah satu ukuran untuk melihat derajat kesehatan di suatu wilayah adalah keluhan kesehatan. Indikator ini penting karena keluhan kesehatan umumnya merupakan gejala awal yang dirasakan oleh seseorang ketika mengalami gangguan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dimaksud mencakup kondisi individu yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik akibat penyakit yang sering dialami, penyakit akut maupun kronis, kecelakaan, tindak kriminalitas, maupun keluhan kesehatan lainnya.

Berdasarkan data Susenas 2024, persentase penduduk di Provinsi Jambi tahun 2024 yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir sebesar 23,73 persen. Persentase ini lebih tinggi untuk penduduk perempuan (25,21 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (22,28 persen). Selain itu penduduk yang tinggal di daerah perdesaan mempunyai persentase keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, yakni 24,17 persen di perdesaan dibandingkan 22,83 persen di perkotaan.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
	[1]	[2]	[3]
Laki-laki	21,18	22,82	22,28
Perempuan	24,48	25,57	25,21
Laki-laki dan perempuan	22,83	24,17	23,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Ukuran derajat kesehatan selanjutnya adalah morbiditas atau tingkat kesakitan. Jumlah penduduk yang mengalami sakit merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas mencerminkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya.

Secara umum, keluhan kesehatan yang biasa dialami penduduk antara lain: demam, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan campak. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, semakin tinggi tingkat morbiditas, yang berarti semakin rendah pula derajat kesehatan wilayah tersebut.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
	[1]	[2]	[3]
Laki-laki	9,51	9,90	9,77
Perempuan	9,11	11,05	10,40
Laki-laki dan perempuan	9,31	10,47	10,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Hasil Susenas 2024 menunjukkan persentase penduduk Provinsi Jambi yang menderita sakit mencapai 10,08 persen dimana angka morbiditas perempuan (10,40 persen) lebih tinggi dibandingkan angka morbiditas laki-laki (9,77 persen). Sementara itu menurut daerah tempat tinggalnya, morbiditas di wilayah perdesaan (10,47 persen) lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan (9,31 persen). Angka ini sebanding dengan keluhan kesehatan penduduk.

Lamanya rawat inap merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Rata-rata lamanya rawat inap penduduk di Provinsi Jambi berada pada kisaran 5,21 hari. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama sakit penduduk di perdesaan (4,68 hari) sedikit lebih lama dibandingkan yang tinggal di perkotaan (6,18 hari). Semakin lamanya dirawat inap (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan oleh sebab suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jumlah Hari Rawat Inap, dan Rata-Rata Lama Rawat Inap (hari) di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
≤3 hari	57,21	59,65	58,79
4–6 hari	25,25	23,16	23,89
≥7 hari	17,54	17,19	17,31
Rata-rata (hari)	6,18	4,68	5,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Derajat kesehatan suatu masyarakat dapat juga ditinjau melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH didefinisikan sebagai perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Tabel 2.4 Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 Provinsi Jambi dan Indonesia (tahun), 2020–2024

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Jambi	73,33	73,38	73,61	73,84	74,06
Indonesia	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Jambi tahun 2024 adalah 74,06 tahun, yang artinya tiap bayi yang lahir secara rata-rata diharapkan dapat hidup hingga usia 74,06 tahun. Selama rentang lima tahunan terakhir telah terjadi peningkatan nilai UHH, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 73,33 tahun. Jika dibandingkan dengan UHH nasional, nilai UHH Provinsi Jambi relatif lebih rendah, dimana nilai UHH Indonesia pada tahun 2024 sebesar 74,15 tahun.

Peningkatan nilai UHH dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya kualitas serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat. Selain itu penerapan perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, perbaikan kondisi sosial-ekonomi serta dukungan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan turut berperan dalam peningkatan nilai UHH.

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi serta melengkapi imunisasi selama masa kehamilan. Karena pemenuhan gizi dan imunisasi merupakan fondasi awal bagi kesehatan seorang anak. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) setelah bayi dilahirkan. ASI merupakan makanan pertama bagi bayi yang memiliki peranan sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak.

ASI memiliki manfaat jangka panjang yang besar karena merupakan sumber nutrisi terbaik dan terlengkap bagi bayi. ASI mengandung protein dan zat gizi berkualitas tinggi serta antibodi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, sekaligus melindungi bayi dari alergi, diare, dan berbagai infeksi lainnya

Oleh sebab itu pemerintah selalu menganjurkan agar ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan, tanpa penambahan atau penggantian makanan maupun minuman lain. Selanjutnya, setelah bayi berusia enam bulan ke atas, pemberian ASI dilanjutkan bersamaan dengan makanan pendamping hingga anak berusia dua tahun.

Susenas 2024 menunjukkan bahwa persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah diberi ASI di Provinsi Jambi mencapai 87,41 persen. Dari kelompok anak tersebut, rata-rata lama pemberian ASI adalah 10,52 bulan di wilayah perkotaan dan 10,06 bulan di wilayah perdesaan. Selain itu, persentase lamanya pemberian ASI pada bayi usia 6–23 bulan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, sejalan dengan rata-rata durasi pemberian ASI yang juga lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan sudah relatif tinggi. Akan tetapi, masih terdapat 27,95 persen anak usia di bawah enam bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Persentasenya di wilayah perdesaan sebesar 30,34 persen lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan yang sebesar 22,27 persen.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes.

Tabel 2.5 Persentase Anak Usia Kurang dari Dua Tahun yang Pernah Diberi ASI Berdasarkan Lama Pemberian Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Rincian [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Pernah diberi ASI	81,74	89,80	87,41
Lamanya diberi ASI			
<6 bulan	22,27	30,34	27,95
6–23 bulan	77,73	69,66	72,05
Rata-rata lamanya diberi ASI (bulan)	10,52	10,06	10,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang sekitarnya. Jenis imunisasi dasar yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/ Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.6 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
BCG (Bacillus Calmette–Guérin)	84,69	82,18	82,99
DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus)	81,69	77,49	78,83
Polio	85,80	81,52	82,89
Campak-rubela (MR)	64,51	63,16	63,59
MMR	50,50	54,95	53,52
Hepatitis B	82,29	79,84	80,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak balita di Provinsi Jambi telah mendapatkan imunisasi dasar masing-masing untuk BCG, DPT, polio, campak-rubela, MMR, dan hepatitis B. Jenis imunisasi yang paling tinggi adalah BCG yang mencapai 82,99 persen. Kemudian diikuti oleh DPT sebesar 78,83 persen, polio sebesar 82,89 persen, dan hepatitis B sebesar 80,63 persen. Sementara untuk imunisasi campak-rubela dan MMR masing-masing baru mencapai sebesar 63,59 persen dan 53,52 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian imunisasi dasar terhadap balita adalah pengetahuan orang tua balita, akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan, serta tenaga penolong persalinan balita.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Menurut *World Health Organization* (WHO), kunci strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi pada proses persalinan adalah keterlibatan tenaga kesehatan terlatih dalam membantu persalinan. Penolong persalinan diartikan sebagai pihak yang memberikan pertolongan pada saat proses kelahiran bayi. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis, karena memiliki kompetensi dalam menerapkan prosedur persalinan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dilakukan melalui peningkatan kinerja sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan, pengawasan obat dan makanan), serta perlindungan finansial bagi penduduk. Sasaran program pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya diarahkan kepada pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dimana yang menjadi indikator adalah jumlah dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya pada puskesmas dan rumah sakit umum daerah.

Pada Susenas 2024, penolong persalinan ditanyakan kepada wanita usia 15–49 tahun berstatus pernah kawin yang melahirkan anak dalam dua tahun terakhir dan pertanyaan merujuk pada proses persalinan anak lahir hidup yang terakhir. Berdasarkan hasil Susenas 2024, persentase persalinan di Provinsi Jambi mayoritas sudah ditolong oleh tenaga kesehatan.

Sebagian besar penolong persalinan terakhir wanita pernah kawin usia 15–49 tahun di Provinsi Jambi adalah bidan (57,91 persen) dan dokter kandungan (35,86 persen). Jika

dibedakan menurut tempat tinggal, penolong persalinan terakhir oleh bidan lebih tinggi di perdesaan dibanding di wilayah perkotaan. Hal ini wajar karena tenaga bidan lebih tersebar di daerah perdesaan, sementara dokter kandungan kebanyakan tersedia di rumah sakit/klinik di wilayah perkotaan.

Tabel 2.7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Penolong Proses Persalinan Terakhir di Provinsi Jambi, 2024

Rincian [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Dokter kandungan	38,82	34,69	35,86
Dokter umum	NA	2,61	2,28
Bidan	57,90	57,91	57,91
Perawat	NA	1,49	1,11
Dukun beranak/paraji	NA	1,87	1,82
Lainnya	–	–	–
Tidak ada	–	NA	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Di perdesaan, masih terdapat dukun beranak/paraji sebagai penolong persalinan perempuan usia 15–49 tahun pernah kawin, yakni mencapai 1,87 persen. Angka ini berada di atas angka total Provinsi Jambi yang sebesar 1,82 persen. Kondisi ini menjadi penting untuk diperhatikan agar persalinan khususnya di wilayah perdesaan sedapat mungkin dilakukan oleh minimal bidan dalam rangka mencegah kematian bayi.

BAB 3

PENDIDIKAN

<https://jambi.bps.go.id>



BAB 3

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan ekonomi, suku, etnis, daerah asal, agama, maupun gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah perlu terus berupaya melaksanakan program pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan mutu pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membekali warga negara dengan kecakapan hidup dan keterampilan yang memadai, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya serta terciptanya masyarakat madani dan modern yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Upaya pembangunan khususnya di daerah dapat dipacu dengan mengutamakan pembangunan manusia melalui pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar akses dan peluang untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Kebijakan pemerintah dengan Program Wajib Belajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia (*Human Capital*) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dengan modal sumber daya manusia yang berkualitas dimaksudkan agar kinerja pembangunan juga akan lebih baik.

Program pembangunan pendidikan nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah perlu terus dievaluasi keberhasilannya. Keberhasilan program-program tersebut tentunya perlu untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan sehingga diperlukan data atau indikator yang dapat mengukur keberhasilan atau tingkat pencapaian pembangunan yang telah dijalankan.

Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini di antaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

3.1 Angka Melek Huruf

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional yaitu memerangi dan memberantas buta huruf yang masih terjadi di masyarakat. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Pengertian lebih luas dari Angka Melek Huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya.

Sementara itu, Angka Buta Huruf (ABH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Kedua indikator tersebut digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD relatif tinggi, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Laki-laki	99,35	98,66	98,88
Perempuan	98,21	96,61	97,15
Laki-laki dan Perempuan	98,77	97,65	98,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Pada tahun 2024, AMH Provinsi Jambi sebesar 98,02 persen. Angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 96,67 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka penduduk 15 tahun ke atas yang tinggal di perdesaan memiliki AMH lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Jika dilihat dari jenis kelamin, kemampuan baca tulis laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Secara umum, AMH laki-laki lebih tinggi dari perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Diduga perempuan yang belum bisa baca tulis ini adalah mereka yang telah dewasa berusia di luar usia sekolah. Jika mengingat paradigma pendidikan yang dianut oleh pemerintah adalah pendidikan untuk semua, sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan dan strateginya antara lain pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun serta pentingnya peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antar daerah dan kesenjangan gender. Oleh karena itu perlu diupayakan program-program yang menyentuh pemberdayaan perempuan, khususnya di perdesaan.

3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Beberapa informasi yang perlu digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan bahwa sejauh mana tingkat pendidikan yang dijalani seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani/ditamatkannya. Selain itu, rata-rata lama sekolah juga digunakan sebagai salah satu ukuran menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Setiap level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalankan oleh seseorang akan dikonversi kedalam satuan tahun lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah enam tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama sembilan tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

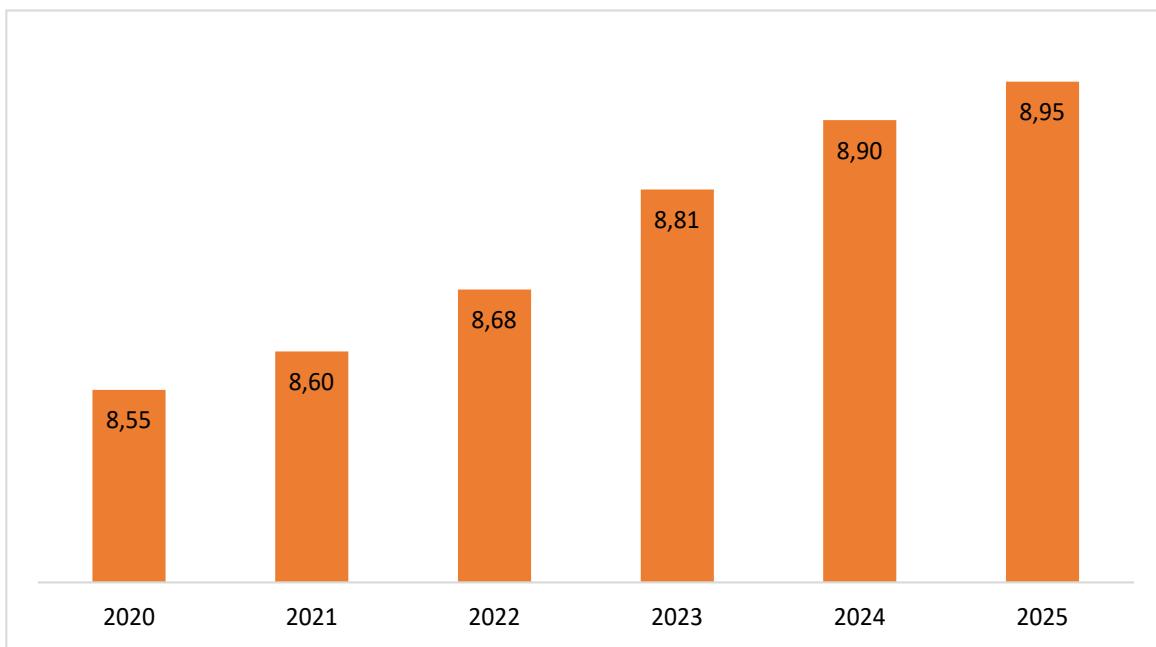
Tabel 3.2 Konversi Tahun Lama Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (tahun)
[1]	[2]
Tidak punya ijazah	0
SD	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
D4	16
S1	17
S2	19
S3	22

Sumber: Badan Pusat Statistik, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/>

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2025 sebesar 8,95 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,90 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi tahun 2025 baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 3 (tiga) SMP.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Gambar 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025

3.3 Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang mencerminkan semakin luas pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang dimiliki, seseorang akan dapat mudah mendapatkan kesempatan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Indikator tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Keberhasilan tersebut diukur dengan meningkatnya persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun atau lulus SMP. Konsep indikator tingkat pendidikan dalam publikasi ini menyertakan juga seseorang yang telah tamat Paket A yang setara dengan tamat SD; tamat Paket B setara dengan tamat SMP; dan tamat paket C setara dengan tamat SMA.

Sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan dasar. Hal ini terlihat dari persentase penduduk menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Ijazah tertinggi yang paling banyak dimiliki oleh penduduk usia 15 tahun ke atas adalah ijazah SMA sederajat sebesar 30,08 persen dan ijazah SD/sederajat sebesar 26,10 persen. Sementara terdapat 9,03 persen penduduk yang tidak punya ijazah.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Rincian [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Tidak punya ijazah	6,29	10,39	9,03
SD sederajat	17,58	30,30	26,10
SMP sederajat	21,98	25,97	24,66
SMA sederajat	38,23	26,07	30,08
Perguruan tinggi	15,91	7,27	10,12
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Ditinjau dari daerah tempat tinggal, terlihat perbedaan kondisi tingkat pendidikan antara masyarakat di perkotaan dibandingkan masyarakat di perdesaan. Persentase penduduk perkotaan dengan tingkat pendidikan SMA ke atas pada setiap jenjang pendidikan selalu lebih tinggi dibanding dengan di wilayah perdesaan. Sebaliknya untuk persentase penduduk dengan pendidikan yang lebih rendah (SMP, SD, belum tamat SD, dan tidak/belum pernah sekolah) lebih tinggi di perdesaan dibanding di wilayah perkotaan.

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Kesempatan seluas-luasnya telah diberikan kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan berbagai upaya, pemerintah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan serta antusias keikutsertaan penduduk dalam bersekolah dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, di antaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah dalam suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Kelompok umur tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni umur 7–12 tahun untuk SD/sederajat, umur 13–15 tahun untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat, umur 16–18 tahun untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat, dan umur 19–23 tahun untuk jenjang pendidikan tinggi.

Meskipun menggunakan kelompok umur yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, perhitungan APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Sebagai contoh, APS kelompok umur 7–12 tahun mencakup seluruh anak usia 7–12 tahun yang masih bersekolah, baik yang sedang menempuh pendidikan SD maupun yang telah melanjutkan ke jenjang SMP, dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok umur tersebut.

APS pada kelompok umur 7–12 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, yakni sebesar 99,61 persen. Namun semakin bertambah usia tampaknya semakin kecil antusias dalam bersekolah. Hal ini terlihat dari semakin rendahnya nilai APS pada kelompok umur yang lebih tua. Terlebih lagi pada kelompok umur 19–23 tahun yang hanya mencapai 25,85 persen.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
7–12 tahun	99,26	99,79	99,61
13–15 tahun	98,34	95,00	96,25
16–18 tahun	79,73	68,04	71,97
19–23 tahun	35,23	21,05	25,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian [1]	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki [2]	Perempuan [3]	Laki-Laki dan Perempuan [4]
7–12 tahun	99,85	99,36	99,61
13–15 tahun	94,64	97,90	96,25
16–18 tahun	70,23	73,70	71,97
19–23 tahun	21,53	30,49	25,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

APS di perkotaan umumnya lebih tinggi dibandingkan di perdesaan pada hampir semua kelompok umur, kecuali usia 7–12 tahun. Perbedaan paling besar terlihat pada kelompok umur 19–23 tahun, yaitu 35,23 persen di perkotaan dan 21,05 persen di perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin, APS perempuan juga lebih tinggi daripada laki-laki pada hampir semua kelompok umur. Kesenjangan terbesar terdapat pada kelompok umur 19–23 tahun, dengan APS perempuan sebesar 30,49 persen dan laki-laki 21,53 persen.

Selain APS, indikator berikutnya untuk melihat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah APM. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dihitung dengan melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Misal untuk APM SD adalah proporsi total anak umur 7–12 tahun yang masih sekolah SD/sederajat terhadap total anak berumur 7–12 tahun.

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
SD	98,11	98,21	98,17
SMP	76,55	81,52	79,65
SMA	68,87	59,25	62,48
Perguruan tinggi	30,04	15,94	20,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, APM di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan pada jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi. APM SD sederajat wilayah perdesaan lebih tinggi 0,10 dari perkotaan. Untuk APM SMP sederajat di wilayah perdesaan lebih besar 4,97 persen dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Sebaliknya, APM SMA sederajat di wilayah perkotaan lebih besar 9,62 persen dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Perbedaan paling besar berdasarkan tempat tinggal dari tabel 3.6 terlihat pada APM perguruan tinggi, yakni selisih 14,10 persen.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
SD	98,83	97,50	98,17
SMP	77,56	81,79	79,65
SMA	62,92	62,05	62,48
Perguruan tinggi	17,44	24,22	20,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Berdasarkan jenis kelamin, hasil Susenas 2024 menunjukkan adanya perbedaan APM antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang pendidikan. APM perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP dan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi murni perempuan pada kedua jenjang tersebut relatif lebih baik. Selisih APM perempuan terhadap laki-laki mencapai 4,23 persen pada jenjang SMP dan meningkat menjadi 6,78 persen pada jenjang perguruan tinggi. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atas, APM laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan tersebut masing-masing sebesar 1,33 persen pada jenjang SD dan 0,87 persen pada jenjang SMA. Temuan ini mencerminkan adanya variasi partisipasi pendidikan menurut jenis kelamin yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan..



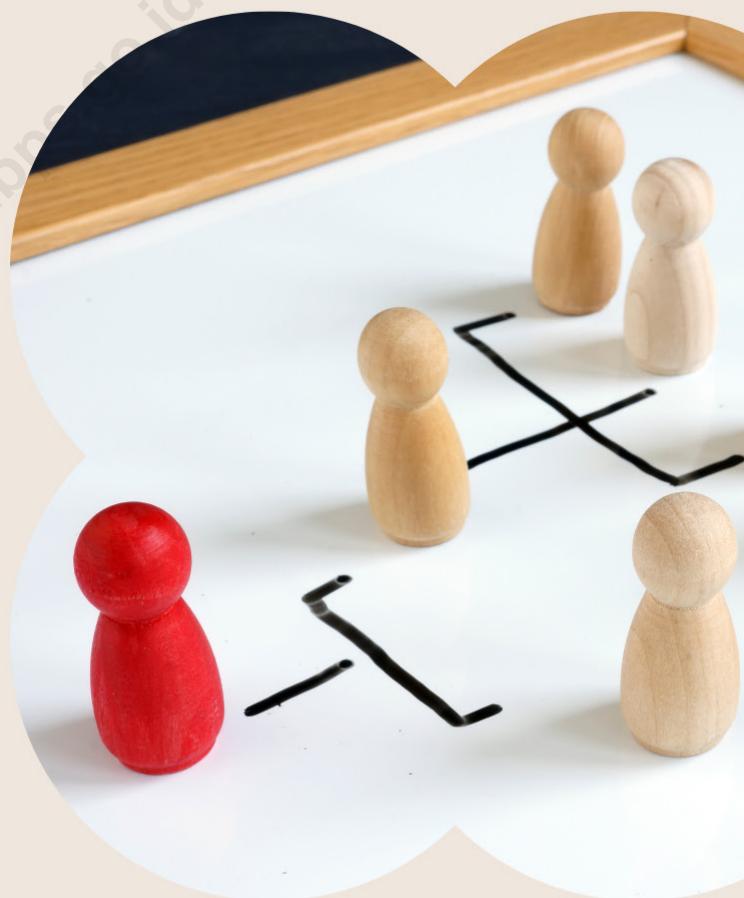
Sumber: <http://www.jambiupdate.com>

Gambar 3.2 Kegiatan Belajar Mengajar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jambi

BAB 4

KETENAGAKERJAAN

<https://jambi.bns.go.id>



BAB 4

KETENAGAKERJAAN

Berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat cepat diantisipasi dan diselesaikan. Permasalahan tersebut di antaranya tingginya pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan nasional. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Dengan mengetahui kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah, seperti seberapa banyak angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja, kualitas yang diukur dengan pendidikan tenaga kerja, dan situasi ketenagakerjaan lainnya, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha serta rata-rata lama kerja akan diuraikan dalam bab ini. Indikator-indikator tersebut bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS rutin setiap tahun.

4.1 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dalam analisis guna mengukur pencapaian hasil pembangunan. TPAK sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

TPAK Provinsi Jambi pada tahun 2024 sebesar 68,87 persen, yang berarti di antara 100 penduduk usia kerja terdapat 68–69 orang yang merupakan angkatan kerja. Selebihnya bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga. TPAK penduduk di perdesaan lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk di perkotaan. Jumlah penduduk angkatan kerja di perdesaan yang lebih tinggi menunjukkan pasokan tenaga kerja di perdesaan relatif lebih besar dan jumlah penduduk yang bersekolah atau mengurus rumah tangga relatif terhadap penduduk usia kerja lebih rendah di perdesaan. Fenomena ini sejalan dengan rendahnya angka partisipasi sekolah di perdesaan dan tingginya jumlah pekerja perempuan yang tidak dibayar di perdesaan. Perempuan di perdesaan lebih memilih untuk membantu mendapatkan penghasilan dibandingkan hanya mengurus rumah tangga.

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, sebesar 86,04 persen berbanding 51,17 persen. Hal ini wajar karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Sedangkan perempuan pada umumnya bekerja hanya untuk menambah penghasilan rumah tangga, perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga, atau mereka yang mempunyai keahlian dan pendidikan tinggi yang diperlukan bagi pasar kerja.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	TPAK	TPT
	[1]	[2]
Perkotaan	66,36	6,53
Perdesaan	70,10	3,47
Perkotaan dan perdesaan	68,87	4,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2024 (Agustus)

Indikator selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha; tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2024 mencapai 4,48 persen. Artinya di antara 100 penduduk angkatan kerja, ada sekitar 4–5 orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha; atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berbeda halnya dengan TPAK di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan, TPT di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan.

Sebagaimana penjelasan di atas, penduduk di perdesaan lebih cenderung bekerja apa saja tanpa memilih pekerjaan dibandingkan penduduk di perkotaan. Terlebih lagi adanya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan, meskipun sebelumnya mereka sudah mempunyai pekerjaan di perdesaan. Mereka berharap di perkotaan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Lapangan usaha yang dominan tersedia di wilayah perdesaan Provinsi Jambi adalah pertanian, sehingga mereka tidak bisa memilih pekerjaan. Selain itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan turut mendorong keputusan untuk bekerja meskipun pilihan lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, maupun upah yang ditawarkan di wilayah perdesaan relatif rendah dibandingkan di perkotaan.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian [1]	TPAK [2]	TPT [3]
Laki-laki	86,04	2,68
Perempuan	51,17	7,62
Laki-laki dan perempuan	68,87	4,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2024 (Agustus)

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi jauh dari TPT laki-laki. dari 100 penduduk angkatan kerja berjenis kelamin perempuan, sebanyak 7-8 orang berstatus pencari kerja. Sedangkan dari 100 penduduk angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki hanya 2-3 orang yang masih mencari kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memasuki pasar kerja

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Memahami dinamika ketenagakerjaan sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena dua hal ini mempunyai keterkaitan yang kuat. Oleh karena itu, mengaitkan karakteristik penduduk dengan berbagai indikator pembangunan seperti indikator ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat perlu dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai.

Tabel 4.3 Tingkat Pegangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
	[1]	[2]	[3]
SD ke bawah	2,63	2,51	2,53
Sekolah Menengah Pertama	3,94	2,92	3,24
Sekolah Menengah Atas	8,32	5,67	6,80
Sekolah Menengah Kejuruan	6,83	4,67	5,82
Diploma I/II/III	7,24	3,68	5,96
Universitas	6,64	5,00	5,95
Jumlah	5,93	3,66	4,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2024 (Agustus)

Salah satu pendekatan analisis yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pengangguran adalah dengan mengamati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan. Di Provinsi Jambi pada tahun 2024, TPT tertinggi didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA/sederajat, yaitu sebesar 6,80 persen. Sementara itu, TPT pada penduduk berpendidikan SD/sederajat tercatat relatif lebih rendah, yakni sebesar 2,53 persen, dan pada penduduk berpendidikan SMP/sederajat sebesar 3,24 persen.

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Sebaliknya, penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung lebih fleksibel dalam memilih jenis pekerjaan, dengan prioritas utama memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pola ini relatif konsisten, baik jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, yaitu perdesaan dan perkotaan, maupun berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 4.4 Tingkat Pegangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
SD ke bawah	0,70	5,41	2,53
Sekolah Menengah Pertama	1,63	6,48	3,24
Sekolah Menengah Atas	3,97	12,79	6,80
Sekolah Menengah Kejuruan	5,75	5,99	5,82
Diploma I/II/III	5,05	6,51	5,96
Universitas	4,51	7,45	5,95
Jumlah	2,68	7,62	4,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2024 (Agustus)

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Karakteristik pekerja yang juga perlu untuk dilihat adalah lapangan usaha dan status pekerjaan. Dengan demikian akan tergambar bagaimana struktur perekonomian di Provinsi Jambi. Informasi mengenai status pekerjaan dapat memberikan gambaran struktur pekerja dan secara tidak langsung menunjukkan produktivitas pekerja.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 8 sektor lapangan usaha utama yaitu pertanian, industri dan pengadaan listrik/air, kontruksi dan real estate, perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan/minum, jasa kemasyarakatan dan sektor lainnya.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, 2022–2024

Rincian	2022	2023	2024
[1]	[2]	(3)	(4)
Pertanian	47,96	45,19	43,92
Industri, listrik, dan air	5,56	5,38	5,25
Konstruksi dan real estate	4,87	4,61	4,81
Perdagangan	14,49	15,11	16,64
Transportasi pergudangan	3,49	3,52	2,98
Penyediaan akomodasi dan makan/minum	5,05	5,42	5,64
Jasa kemasyarakatan	9,01	9,55	9,19
Lainnya	9,56	11,22	11,57
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Mayoritas penduduk Provinsi Jambi di tahun 2024 masih bekerja di sektor/lapangan usaha pertanian. Penduduk Provinsi Jambi yang bekerja di sektor tersebut sebesar 43,92 persen, menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 45,19 persen. Sektor yang dominan berikutnya adalah perdagangan dimana 16,64 persen penduduk Provinsi Jambi bekerja pada sektor tersebut.

Struktur ketenagakerjaan berikutnya adalah berdasarkan status pekerjaan utama. Status pekerjaan utama dibedakan menjadi 6 (enam) yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar. Pekerja di Provinsi Jambi terbanyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Bahkan di perkotaan, persentasenya mencapai 46,27 persen dari total pekerja.

Tabel 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
Berusaha sendiri	20,80	25,45	23,78
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	9,97	14,98	13,19
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,54	5,50	5,52
Buruh/karyawan/pegawai	46,27	30,47	36,13
Pekerja bebas	6,96	8,82	8,16
Pekerja tidak dibayar	10,46	14,77	13,23
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2024 (Agustus)

Kondisi ini menggambarkan bahwa pekerja di Provinsi Jambi lebih memilih bekerja pada suatu instansi atau pada pengusaha pemberi kerja. Status sebagai buruh/karyawan/pegawai lebih dipilih, karena mempunyai penghasilan tetap dan tidak memiliki risiko usaha. Satu-satunya risiko sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 4.7 Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2024

Rincian	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Berusaha sendiri	23,83	23,70	23,78
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	14,84	10,17	13,19
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	7,22	2,41	5,52
Buruh/karyawan/pegawai	38,30	32,17	36,13
Pekerja bebas	10,43	4,00	8,16
Pekerja tidak dibayar	5,37	27,56	13,23
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2024 (Agustus)

Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, data yang tersedia mengindikasikan adanya fenomena bias gender dalam status pekerjaan. Persentase pekerja tidak dibayar pada perempuan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki, masing-masing sebesar 27,56 persen dan 5,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam aktivitas kerja tanpa imbalan, terutama dalam lingkup pekerjaan keluarga.

Di Provinsi Jambi, persentase pekerja tidak dibayar di wilayah perdesaan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 14,77 persen dan 10,46 persen. Pekerja tidak dibayar tersebut umumnya bekerja atau membantu usaha dengan ikatan hubungan keluarga dengan pemberi kerja, seperti anak atau orang tua dari pemberi kerja..

4.4 Jumlah Jam Kerja

Salah satu jenis pengangguran yang cukup populer adalah setengah pengangguran. Konsep setengah pengangguran menggunakan jumlah jam kerja sebagai variabelnya. Individu dikategorikan sebagai setengah pengangguran apabila memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Jumlah jam kerja yang dimaksud tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan.

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja per Minggu di Provinsi Jambi, 2022–2024

Rincian	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]
1–7 jam	1,58	2,87	2,64
8–14 jam	3,41	7,40	5,13
15–24 jam	10,31	18,17	12,09
25–34 jam	16,26	17,86	14,11
≥35 jam	66,58	53,70	64,24
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Jumlah jam kerja per minggu penduduk Provinsi Jambi yang bekerja pada tahun 2024 sebagian besar lebih dari 35 jam seminggu. Persentase penduduk yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu mengalami peningkatan dari 53,70 persen pada tahun 2023 menjadi 64,24 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja paruh waktu dan tenaga kerja setengah menganggur pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan.

BAB 5

TARAF DAN POLA

KONSUMSI

<https://jambi.bnps.go.id>



BAB 5

TARAF DAN POLA KOSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Bab ini akan menguraikan gambaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jambi berdasarkan hasil Susenas 2024. Ada beberapa pokok pembahasan yang dibagi dalam tiga subbab yaitu pengeluaran rumah tangga baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan; gini ratio; serta Konsumsi kalori; dan protein per kapita per hari.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda.

Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

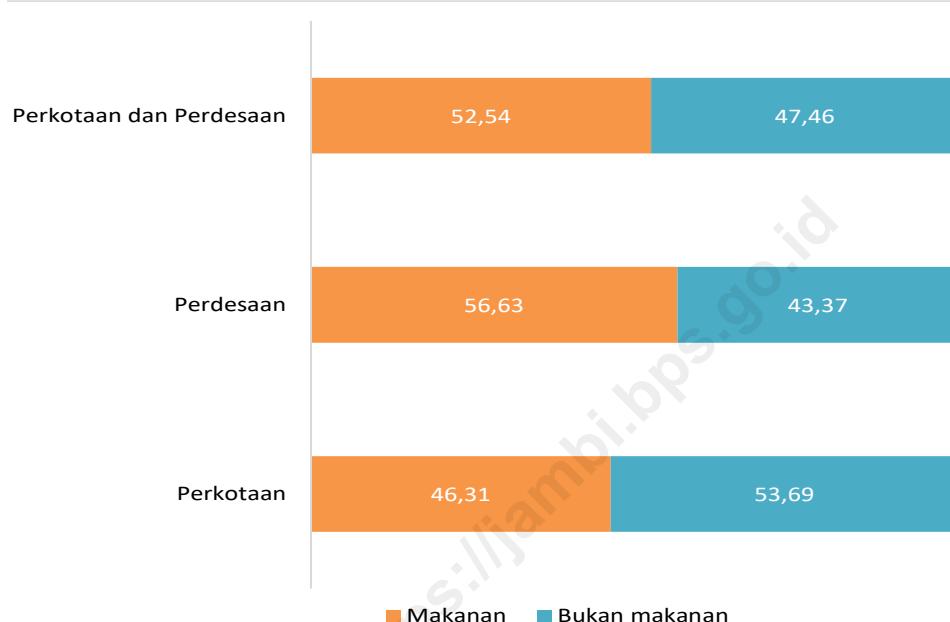
Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang memiliki tingkat konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung/diinvestasikan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Jambi (persen), 2023–2024

Rincian	2023	2024
[1]	[2]	[3]
Makanan	50,62	52,54
Bukan makanan	49,38	47,46
a. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	24,87	24,30
b. Aneka barang dan jasa	10,95	10,21
c. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	3,23	3,33
d. Barang tahan lama	4,64	4,47
e. Pajak, pungutan, dan asuransi	3,66	3,55
f. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2,03	1,60
Jumlah makanan dan bukan makanan	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2024, rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Jambi sebesar 52,54 persen masih digunakan untuk alokasi konsumsi makanan, sisanya sebesar 47,46 persen digunakan untuk konsumsi bukan makanan. Sementara itu, dari total konsumsi bukan makanan yang dikeluarkan oleh penduduk Provinsi Jambi, hampir dari setengahnya dialokasikan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga. Proporsi terbesar kedua dihabiskan untuk konsumsi aneka barang dan jasa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

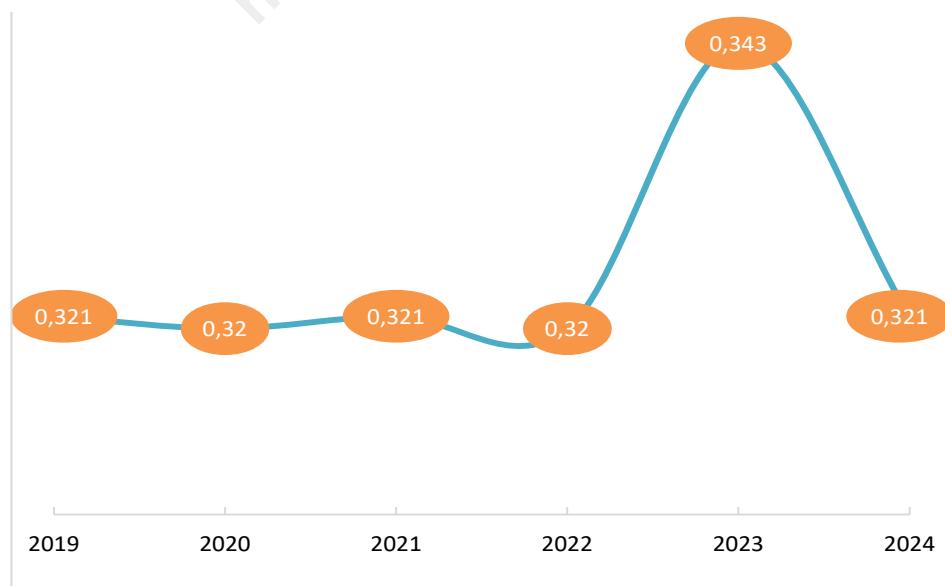
Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Pola pengeluaran konsumsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Pada tahun 2024, persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan pada penduduk perkotaan tercatat lebih rendah dibandingkan penduduk perdesaan. Sebaliknya, persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di wilayah perdesaan.

Hasil Susenas 2024 menunjukkan sekitar 56,63 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sisanya untuk konsumsi bukan makanan. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, sebesar 46,31 persen pengeluaran penduduk dialokasikan untuk konsumsi bukan makanan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk di wilayah perdesaan.

5.2 Gini Ratio

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak mencerminkan sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Gambar 5.2 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Jambi, 2019–2024

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah menggunakan kriteria Bank Dunia¹. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan dalam 3 kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria Bank Dunia ada indikator juga sering digunakan yaitu Indeks Gini².

Pada Gambar 5.2 terlihat bahwa gini ratio di Provinsi Jambi selama 2019–2022 cenderung menurun, akan tetapi kembali meningkat tajam di tahun 2023. Selama periode 2019–2022, gini ratio Provinsi Jambi relatif stabil pada rentang 0,320–0,321 dan kembali meningkat tajam pada tahun 2023 dengan gini rasio sebesar 0,343. Pada tahun 2024, gini ratio mengalami penurunan 0,022 poin menjadi 0,321. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan di provinsi Jambi ini digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah.

¹ Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan penduduk ini digambarkan oleh persipendapatan kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- Memperoleh <12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- Memperoleh 12–17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- Memperoleh >17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

² Nilai dari Indeks Gini berkisar 0–1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Tabel 5.2 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Kelompok Pendapatan di Provinsi Jambi, 2019–2024

Kelompok Pendapatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
40 persen terendah	20,84	20,90	20,93	21,14	20,60	21,65
40 persen menengah	38,33	38,11	38,09	37,81	35,76	36,48
20 persen teratas	40,82	40,99	40,98	41,05	43,64	41,87
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Pada tahun 2024, hasil pengukuran ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, memperlihatkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati sekitar 21,65 persen total konsumsi di Provinsi Jambi. Kemudian, 40 persen penduduk berpendapatan sedang menikmati sekitar 36,48 persen total konsumsi di Provinsi Jambi, sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi menikmati sekitar 41,87 persen total konsumsi.

Data tersebut memperlihatkan fakta bahwa 20 persen penduduk berpendapatan tinggi di Provinsi Jambi, mengkonsumsi lebih banyak dua kali lipat total konsumsi dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih mengalami masalah ketimpangan pendapatan, akan tetapi tingkat ketimpangannya masih rendah, terbukti dari porsi konsumsi penduduk 40 persen penduduk berpendapatan terendah nilainya masih di atas angka 17 persen.

5.3 Konsumsi Kalori dan Protein

Salah satu indikator kesehatan yang cukup penting adalah asupan gizi rumah tangga yang terdiri dari kalori (energi) dan protein. Kekurangan konsumsi gizi dari standar minimum akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas, dan produktivitas kerja. Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan mental (Taufik, 2011).

Tabel 5.3 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Rincian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
Kalori (kkal)	2.080,21	2.016,41	2.037,75
Protein (gram)	65,92	58,63	61,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Berdasarkan hasil Susenas 2024, rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Provinsi Jambi masing-masing sebesar 2.037,75 kkal dan 61,07 gram per kapita per hari. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, rata-rata kecukupan energi dan protein yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia pada tingkat konsumsi masing-masing adalah sebesar 2.100 kkal dan 57 gram per kapita per hari. Dengan demikian, rata-rata konsumsi kalori penduduk Provinsi Jambi telah mendekati angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein bahkan telah berada di atas standar kecukupan yang ditetapkan.

Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal, terdapat pola perbedaan pada kedua jenis konsumsi tersebut. Rata-rata konsumsi energi penduduk di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan, masing-masing sebesar 2.080,21 kkal dan 2.016,41 kkal per kapita per hari. Pola serupa juga terlihat pada konsumsi protein, di mana penduduk perkotaan memiliki tingkat konsumsi protein yang lebih baik dibandingkan penduduk perdesaan.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi status gizi penduduk antara lain daya beli dan tingkat pendidikan (Annisa, 2014). Selain itu, faktor budaya masyarakat serta ketersediaan komoditas pangan di suatu wilayah juga berhubungan erat dengan tingkat konsumsi energi dan protein. Kecukupan gizi yang baik akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang, yang pada akhirnya turut menentukan tingkat produktivitas penduduk. Produktivitas manusia yang optimal merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan suatu daerah.



Sumber: <https://pergizi.org/>

Gambar 5.3 Tumpeng Gizi Seimbang Menurut Kementerian Kesehatan

BAB 6

PERUMAHAN DAN

LINGKUNGAN

<https://jambi.bnps.go.id>



BAB 6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan tingkat intensitas kebutuhannya, manusia memiliki tiga kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Papan atau dapat juga diartikan sebagai tempat tinggal yang dapat menjadi tempat bernaung manusia. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah yang dimilikinya/ditempatinya. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Tempat tinggal yang nyaman akan mendukung tercapainya peningkatan kualitas fisik dan psikologis penghuninya (Sanjoto, 2015).

Kebutuhan rumah saat ini semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Akibatnya, lahan produktif semakin lama semakin berkurang, berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Hal ini yang paling terlihat di wilayah perkotaan, lahan-lahan produktif milik penduduk, baik sawah maupun ladang sedikit demi sedikit berubah menjadi pemukiman, baik yang dibangun oleh masyarakat sendiri maupun oleh pengembang dalam bentuk komplek-komplek perumahan.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lainnya yang meliputi sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Kondisi Fisik Rumah Tempat Tinggal

Menurut WHO salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2 . Sedangkan menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m^2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m^2 .

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Rincian [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
≤ 19	0,71	0,23	0,38
20–49	22,19	22,43	22,35
50–99	47,80	53,94	51,93
100–149	19,70	17,39	18,15
≥ 150	9,60	6,01	7,19
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Berdasarkan hasil Susenas 2024, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jambi memiliki luas lantai sekitar $50\text{--}99\text{ m}^2$, yaitu sebesar 51,93 persen. Selanjutnya sebanyak 22,35 persen rumah tangga menempati hunian dengan luas lantai $20\text{--}49\text{ m}^2$. Jika dirinci menurut wilayah tempat tinggal, baik di perkotaan

maupun perdesaan persentase rumah tangga dengan luas lantai terbesar juga berada pada kategori 50–99 m². Di wilayah perkotaan, persentasenya tercatat sebesar 47,92 persen, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 53,92 persen. Jika dilihat lebih mendalam, akan kita dapat bahwa sekitar 29,39 persen dari total rumah huni di wilayah perkotaan justru memiliki luas di atas 100 m². Sedangkan di perdesaan hanya sekitar 23,40 persen. Rumah huni dengan lantai luas dapat mengindikasikan beberapa hal, salah satunya adalah tingkat perekonomian suatu rumah tangga. Semakin memiliki penghasilan besar, maka seseorang dapat membangun rumah dengan ukuran yang lebih leluasa sebagai tempat tinggalnya. Hal ini mengingat cukup tingginya harga bahan bangunan dan harga tanah sebagai modal untuk membangun rumah yang luas.

6.2 Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Menurut Permenpera Nomor 29 tahun 2008, rumah layak huni harus memenuhi beberapa persyaratan seperti keselamatan bangunan (pondasi bangunan), menjamin kesehatan (kecukupan pencahayaan, penghawaan, dan penyediaan sanitasi layak), serta memenuhi kecukupan luas minimum. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas rumah tinggal dari susenas adalah jenis lantai, jenis atap dan jenis dinding.

Secara umum di Provinsi Jambi, kualitas rumah yang dihuni jika menilik dari aspek jenis lantai, sebagian besar sudah menggunakan jenis lantai semen. Porsi rumah tinggal dengan jenis lantai ini hampir setengah dari seluruh rumah huni yang ada di Provinsi Jambi, yakni 44,89 persen. Sementara untuk rumah yang masih menggunakan bambu/tanah/lainnya sebesar 1,35 persen. Dengan kata lain, pada tahun 2024 sebanyak 98,65 persen telah menggunakan lantai terluas bukan tanah.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Lantai Terluas [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Marmer/granit	3,51	1,74	2,32
Keramik	49,03	26,67	33,99
Parket/vinil/permadani/ubin/tegel/teraso	0,88	1,45	1,27
Kayu/papan	12,63	17,91	16,18
Semen/bata merah	33,06	50,64	44,89
Bambu, tanah, Lainnya	0,89	1,58	1,35
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap dan dinding terluas yang digunakan. Atap merupakan penutup bagian atas suatu bangunan sehingga penghuninya yang berdiam dibawahnya akan terlindungi dari teriknya matahari, hujan, dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas 2024, baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan mayoritas penduduk Provinsi Jambi menggunakan jenis atap terluas berbahan seng, yaitu masing-masing sebesar 82,24 persen dan 75,59 persen. Kemudian diikuti oleh jenis atap berbahan genteng sebesar 12,57 persen di daerah perkotaan dan 20,46 persen di daerah perdesaan.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Atap Terluas [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Beton	3,10	1,20	1,82
Genteng	12,57	20,46	17,88
Seng, kayu sirap	82,24	75,59	77,77
Asbes	1,68	2,60	2,30
Bambu/jerami/ijuk/daun/rumbia, lainnya	NA	0,15	0,23
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Selanjutnya, jika ditinjau dari jenis dinding terluas rumah tangga, secara keseluruhan tempat tinggal di Provinsi Jambi didominasi oleh dinding terluas berbahan tembok, plesteran anyaman bambu, atau kawat, dengan persentase mencapai 71,92 persen.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, di daerah perkotaan, perumahan didominasi oleh dinding terluas berbahan tembok dengan persentase sebesar 79,86 persen. Sementara itu, di wilayah perdesaan, dinding terluas berbahan tembok juga mendominasi, yaitu sebesar 68,07 persen. Selain itu, jenis dinding lain yang masih cukup banyak digunakan adalah plesteran anyaman bambu/kawat/kayu papan serta batang kayu, dengan persentase mencapai 27,41 persen.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Dinding Terluas	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
Tembok	79,86	68,07	71,92
Plesteran anyaman bambu/kawat, kayu papan, batang kayu	19,76	31,13	27,41
Anyaman bambu, bambu, lainnya	0,38	0,80	0,66
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Status kepemilikan rumah tinggal mencakup rumah sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara dan status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang memiliki rumah status milik sendiri dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan Susenas 2024, sebesar 89,27 persen rumah tangga di Provinsi Jambi memiliki rumah tinggal berstatus milik sendiri. Adapun rumah dengan status kepemilikan kontrak/sewa, kecenderungannya di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Rumah tangga berstatus kontrak/sewa mencapai 7,01 persen dari total rumah tinggal di perkotaan.

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Milik sendiri	81,30	93,14	89,27
Kontrak/sewa	7,01	0,82	2,84
Bebas sewa	10,84	5,24	7,07
Dinas/lainnya	0,85	0,80	0,82
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Hal ini tentu tidak terlepas dari isu migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan untuk mencari peruntungan kehidupan yang lebih baik seperti tujuan untuk perbaikan aspek ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Umumnya para pendatang ini masih belum mampu memiliki rumah sendiri, sehingga kontrak/sewa rumah menjadi pilihan utama di samping ada pula yang memilih menumpang di tempat sanak saudara.

6.4 Fasilitas Rumah Tempat Tinggal

Selain kualitas fisik, fungsi kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah seperti tersedianya sumber air bersih, fasilitas jamban sendiri, sanitasi layak, dan sumber penerangan listrik. Rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap air minum bersih apabila sumber air minum bersih berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ≥ 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Tersedianya sumber air minum bersih juga merupakan salah satu target yang ingin dicapai melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Berdasarkan hasil Susenas 2024 sekitar 71,61 persen rumah tangga di Provinsi Jambi sudah memiliki akses terhadap air bersih dan lebih dari 86,91 persen rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak.

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Sumber Air Minum [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Air kemasan bermerk/air isi ulang	46,28	22,76	30,45
Leding	15,67	6,63	9,59
Sumur bor/pompa	4,31	9,26	7,64
Sumur terlindung	20,01	32,16	28,19
Sumur tak terlindung	6,19	10,37	9,00
Mata air terlindung, air hujan	6,76	13,14	11,05
Mata air tak terlindung, air permukaan, lainnya	0,79	5,69	4,09
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Permasalahan sumber daya air merupakan hal penting yang diangkat dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) (Tortajada & Biswas, 2018). Pengelolaan dan penyediaan air bersih berhubungan erat dengan sanitasi dan konsekuensi kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Rumah tangga yang mengkonsumsi sumber air minum tidak bersih di suatu daerah harus mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain air bersih, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik. Adapun jika menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban, maka dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun, maka akan semakin besar dampaknya terhadap sanitasi lingkungan.

Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Besar dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Fasilitas Jamban	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
Digunakan sendiri	92,23	90,07	90,78
Digunakan bersama rumah tangga tertentu	3,86	3,57	3,66
MCK komunal, MCK umum	NA	0,90	0,70
Ada, ART tidak menggunakan	NA	0,04	NA
Tidak ada fasilitas	3,41	5,42	4,76
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Berdasarkan data Susenas 2024, sebesar 90,78 persen rumah tangga di Provinsi Jambi memiliki fasilitas jamban sendiri. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas jamban terlihat cukup besar mencapai 4,76 persen. Bahkan jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal sebanyak 5,42 persen rumah tangga di daerah perdesaan tidak memiliki fasilitas jamban. Dengan kata lain, lebih dari lima persen rumah tangga di daerah perdesaan membuang air besar di sungai/kebun/ladang/hutan dan sejenisnya.

Dalam hal ini perlu ada peran serta aktif masyarakat terutama kader kesehatan dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang jamban dengan menggunakan media pertemuan yang ada. Dukungan pemerintah pun turut diperlukan untuk memfasilitasi masalah dana dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan jamban oleh masyarakat.

Fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan nonPLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Dari tabel di bawah ini, terlihat bahwa secara umum sumber penerangan utama rumah tangga di Provinsi Jambi berasal dari listrik, sebanyak 98,90 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dan sebanyak 0,68 persen rumah tangga menggunakan listrik nonPLN. Sementara sumber penerangan utama rumah tangga yang bukan dari listrik sebanyak 0,42 persen, seperti penggunaan petromak, lilin, dan sejenisnya.

Tabel 6.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Sumber Penerangan [1]	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan [2]	Perdesaan [3]	Perkotaan dan Perdesaan [4]
Listrik PLN	99,45	98,63	98,90
Listrik non PLN	0,33	0,85	0,68
Bukan listrik	NA	0,52	0,42
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pengguna sumber penerangan listrik nonPLN dan bukan listrik di daerah perdesaan lebih besar yaitu sebesar 1,37 persen (0,85 persen listrik nonPLN dan 0,52 persen bukan listrik) sedangkan di perkotaan kurang dari satu persen. Hal ini karena di perdesaan khususnya daerah terpencil jaringan listrik PLN tidak masuk. Solusinya masyarakat perdesaan memanfaatkan energi lain seperti energi matahari, biogas, dan *hybrid* untuk menghasilkan energi listrik (Ansori et al., 2020).

Saat ini energi listrik merupakan sumber yang sangat penting bagi kehidupan. Pada rumah tangga, energi listrik selain dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan juga untuk proses yang melibatkan barang-barang elektronik keperluan rumah tangga. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumber energi tak terbarui, yang ketersediaanya terbatas.

BAB 7

KEMISKINAN

<https://jambi.bnppgo.id>



BAB 7

KEMISKINAN

Salah satu permasalahan bangsa yang harus segera diatasi dan diselesaikan yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan secara sistemik, terpadu dan komprehensif dari semua pihak. Berbagai pihak yang memegang peranan penting dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat.

Negara melalui pemerintah pusat terus berupaya menanggulangi kemiskinan dengan berbagai macam program pembangunan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

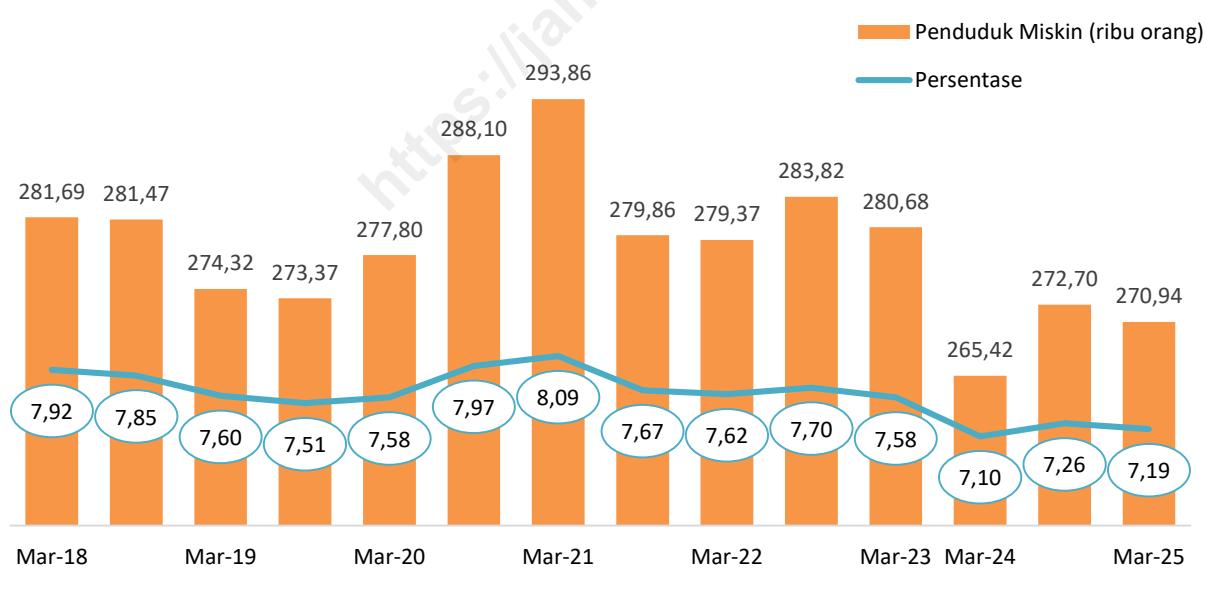
Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimum. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan menekan ekonomi, bukan pada pemerataan terhadap sumber daya ekonomi (Multifiah, 2011).

Dalam menghitung indikator kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan yaitu dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri atas dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dengan cara ini, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi selama kurun waktu 2018–2024 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada periode Maret 2020–Maret 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan pada periode Maret 2020–Maret 2021 dipicu oleh goncangan pandemi COVID-19. Secara absolut selama kurun waktu 2018–2025 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari 281,69 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 270,94 ribu orang pada Maret 2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Gambar 7.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, 2018–2024

Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 270,94 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2024, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 5,52 ribu jiwa. Namun, apabila dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin justru mengalami penurunan sebesar 9,74 ribu jiwa. Ditinjau menurut daerah tempat tinggal, secara absolut jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi lebih banyak berada di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Pada Maret 2025, penduduk miskin di perdesaan mencapai 150,64 ribu jiwa atau 55,60 persen dari total penduduk miskin, sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 120,30 ribu jiwa atau 44,40 persen. Meskipun demikian, dari sisi persentase terhadap jumlah penduduk masing-masing wilayah, tingkat kemiskinan di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

Tabel 7.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2018–2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018 (Maret)	118,62	163,07	281,69	10,41	6,75	7,92
2019 (Maret)	115,08	159,24	274,32	9,81	6,53	7,60
2020 (Maret)	123,64	154,16	277,80	10,41	6,23	7,58
2021 (Maret)	137,24	156,61	293,86	11,52	6,42	8,09
2022 (Maret)	127,34	152,03	279,37	10,51	6,19	7,62
2023 (Maret)	125,30	155,39	280,68	10,19	6,28	7,58
2024 (Maret)	118,39	147,03	265,42	9,50	5,90	7,10
2025 (Maret)	120,30	150,64	270,94	9,52	6,01	7,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Penduduk Provinsi Jambi yang lebih banyak tinggal di perdesaan, menjadikan persentase penduduk miskin di perkotaan secara relatif lebih besar daripada penduduk miskin di perdesaan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi pada Maret 2025 di perkotaan sebesar 9,52 persen sementara di perdesaan 6,01 persen.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Banyaknya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK) karena penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas. Sementara GKBM merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 komoditas di perdesaan.

Kenaikan harga barang yang terjadi dari tahun ke tahun juga berpengaruh terhadap besaran GK. Ini karena GK mencerminkan pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang perlu dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga jika terjadi kenaikan harga pada paket komoditas yang termasuk dalam kebutuhan dasar tersebut maka GK juga akan disesuaikan.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi (rupiah), Maret 2018–Maret 2025

Tahun	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018 (Maret)	487.791	398.501	426.251
2018 (September)	492.364	401.765	430.435
2019 (Maret)	511.654	418.821	448.509
2019 (September)	524.643	437.987	464.558
2020 (Maret)	549.033	453.502	483.542
2020 (September)	552.498	454.754	485.920
2021 (Maret)	583.748	470.758	506.355
2021 (September)	598.178	479.006	517.722
2022 (Maret)	635.708	503.811	545.870
2022 (September)	684.555	541.267	585.950
2023 (Maret)	699.123	552.720	599.688
2023 (September)
2024 (Maret)	744.044	606.150	650.115
2024 (September)	754.235	612.745	658.100
2025 (Maret)	759.799	618.121	664.127

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode Maret 2018–Maret 2025. Selama periode Maret 2024–Maret 2025 terjadi kenaikan GK Provinsi Jambi sebesar Rp14.012 atau sebesar 2,15 persen. Menurut daerah tempat tinggal, maka GK Maret 2025 untuk wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yaitu sebesar Rp759.799 untuk perkotaan dan Rp618.121 untuk perdesaan. Hal ini menggambarkan penduduk perkotaan perlu biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak untuk makanan dan non makanan dibandingkan penduduk perdesaan. Sehingga, tingkat kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan persentase di perdesaan.

Indikator selanjutnya, mengenai seberapa dalam tingkat kemiskinan masyarakat terhadap garis kemiskinan (kedalaman kemiskinan) dan seberapa besar kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin tersebut (keparahan kemiskinan). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) mencerminkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, Maret 2018–Maret 2025

Tahun (1)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan dan Perdesaan (4)
2018 (Maret)	1,68	1,12	1,30
2018 (September)	1,96	0,92	1,26
2019 (Maret)	1,74	0,98	1,23
2019 (September)	1,68	0,92	1,17
2020 (Maret)	1,71	0,80	1,10
2020 (September)	1,77	0,89	1,18
2021 (Maret)	2,20	0,85	1,29
2021 (September)	1,81	0,74	1,09
2022 (Maret)	1,67	0,93	1,17
2022 (September)	1,74	0,92	1,19
2023 (Maret)	1,62	0,99	1,19
2023 (September)
2024 (Maret)	1,49	0,85	1,06
2024 (September)	2,27	0,83	1,31
2025 (Maret)	1,47	0,73	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jambi dari Maret 2018–Maret 2025 menunjukkan tren yang berbeda. Pada periode Maret 2018 dan September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun, yakni dari 1,30 pada Maret 2018 menjadi 1,26 pada September 2018. Keadaan ini terus menurun hingga pada tahun Maret 2021 meningkat kembali menjadi 1,29. Indeks Kedalaman Kemiskinan semakin menurun hingga menjadi 1,088. Pada Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan mencapai 0,98 atau paling rendah sejak 2018.

Pada umumnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi untuk wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan kalau pengeluaran rata-rata penduduk miskin di perkotaan jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan wilayah perdesaan. Dengan kata lain, untuk mengentaskan kemiskinan (membuat rata-rata pengeluaran penduduk miskin setidaknya sama dengan garis kemiskinan) di perkotaan diperlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan perdesaan.

Tabel 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, Maret 2018–Maret 2025

Tahun (1)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan dan Perdesaan (4)
2018 (Maret)	0,37	0,30	0,32
2018 (September)	0,57	0,19	0,31
2019 (Maret)	0,44	0,23	0,30
2019 (September)	0,39	0,20	0,26
2020 (Maret)	0,43	0,17	0,25
2020 (September)	0,46	0,18	0,27
2021 (Maret)	0,58	0,17	0,30
2021 (September)	0,38	0,15	0,23
2022 (Maret)	0,39	0,20	0,26
2022 (September)	0,39	0,16	0,24
2023 (Maret)	0,37	0,25	0,29
2023 (September)
2024 (Maret)	0,37	0,19	0,25
2024 (September)	0,85	0,20	0,42
2025 (Maret)	0,32	0,14	0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas

Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan pada bulan Maret 2025 di perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, masing-masing tercatat sebesar 0,32 dan 0,14. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di perkotaan relatif lebih besar dibandingkan perdesaan. Berdasarkan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2025 cenderung lebih kompleks dan memprihatinkan dibandingkan kemiskinan di wilayah perdesaan.

BAB 8

SOSIAL LAINNYA

<https://jambi.bnps.go.id>



BAB 8

SOSIAL LAINNYA

Pada bab terakhir ini akan diuraikan beberapa data dan informasi sosial lainnya yang mempunyai relevansi dengan indikator kesejahteraan rakyat, seperti kepemilikan/penguasaan dan pemanfaatan perangkat teknologi informasi, akses internet serta korban kejahatan.

8.1 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Akses pada informasi dan hiburan menjadi indikator sosial lainnya dalam hal mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi biasanya mudah untuk mendapatkan akses pada informasi dan hiburan. Pada masyarakat yang kehidupan sosialnya sudah mapan kebutuhan akan akses informasi dan hiburan bukan lagi menjadi sesuatu yang mewah. Akses ke jasa informasi dan hiburan sudah mengarah menjadi gaya hidup, terlebih dengan adanya dukungan perkembangan teknologi yang pesat akan hal tersebut.

Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon seluler pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet, menjadikan semakin mudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengamati indikator-indikator yang menggambarkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam bahasan ini, indikator TIK tersebut digambarkan melalui persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah dan memiliki komputer/laptop; serta persentase penduduk umur lima tahun ke atas yang memiliki telepon seluler dan mengakses internet.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah dan Komputer/Laptop Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Perangkat TIK yang Dimiliki	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon rumah	1,21	NA	0,46
Komputer/laptop	30,31	11,41	17,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Ada sekitar 0,46 persen rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki telepon rumah. Mayoritas rumah tangga yang memiliki telepon rumah berada pada wilayah perkotaan sebanyak 1,21 persen. Hal ini terkait dengan ketersediaan prasarana telepon rumah yang memang lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin dirasa tidak praktis dan kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Penguasaan dan kepemilikan komputer/laptop di Provinsi Jambi secara keseluruhan sebesar 17,60 persen rumah tangga. Dilihat berdasarkan tempat tinggal, maka terlihat masih lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan, masing-masing sebesar 30,31 persen di perkotaan dan 11,41 persen di perdesaan.

Indikator penggunaan TIK lainnya yaitu penguasaan telepon seluler dan akses internet. Rumah tangga dikatakan mengusai telepon seluler atau akses internet jika minimal ada salah satu anggota rumah tangganya yang menguasai telepon seluler atau akses internet menggunakan referensi waktu selama tiga bulan terakhir.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Aktivitas (1)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan dan Perdesaan (4)
Memiliki telepon seluler	89,77	83,87	85,85
Akses internet	78,17	68,55	71,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Rumah tangga yang memiliki minimal satu telepon seluler di Provinsi Jambi telah mencapai 85,85 persen. Bahkan di perkotaan telah mencapai 89,77 persen. Sementara di perdesaan baru mencapai 83,87 persen. Angka ini diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Pada tahun 2024, sebanyak 71,76 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 (68,14 persen). Aksesibilitas internet wilayah perkotaan lebih mudah dibandingkan wilayah perdesaan. Hal ini terlihat dari persentase pengguna internet di wilayah lebih banyak mencapai 78,17 persen, sedangkan di daerah perdesaan baru mencapai 68,55 persen. Perbedaan ini selain disebabkan oleh ketersediaan jaringan internet di perkotaan yang lebih banyak, dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dalam dunia kerja dan gaya hidup masyarakat perkotaan.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, maka dapat diamati bahwa penduduk yang menggunakan telepon seluler untuk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan, baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Perbedaan yang cukup

signifikan ini disebabkan karena laki-laki memiliki mobilitas yang lebih tinggi (terutama kegiatan di luar rumah) dibandingkan perempuan seperti bekerja dan aktivitas lainnya. Alat komunikasi mutlak diperlukan apabila mempunyai kegiatan di luar rumah. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ditengarai mengurangi jumlah persentase penggunaan telepon seluler.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Seluler dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Kelamin	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	91,89	87,79	89,14
Perempuan	87,67	79,82	82,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Selain telepon seluler, alat komunikasi lain yang digunakan untuk mengakses sarana informasi dan hiburan lewat internet antara lain: komputer/desktop, laptop/*notebook* dan HP/ponsel. Di daerah perkotaan sebanyak 3,61 persen penduduknya mengakses internet melalui laptop/*notebook* sedangkan di daerah perdesaan hanya sebanyak 0,95 persen.

Tabel 8.4 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alat yang digunakan untuk Mengakses Internet di Provinsi Jambi, 2024

Alat yang Digunakan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Komputer/ PC <i>desktop</i>	3,61	0,95	1,92
Laptop/ <i>notebook</i>	14,64	4,21	8,01
HP/ponsel	98,99	99,26	99,16
Lainnya	0,56	0,22	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

8.2 Akses Terhadap Perlindungan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendataan Susenas juga menyajikan informasi mengenai perlindungan sosial, antara lain persentase rumah tangga yang memperoleh bantuan tunai terkait pengalihan subsidi BBM, persentase rumah tangga yang membeli/menerima beras murah, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha, dan persentase rumah tangga yang menerima bantuan siswa miskin. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lain guna meningkatkan kesejahteraannya.

Persentase rumah tangga di Provinsi Jambi yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) di Provinsi Jambi sebanyak 12,25 persen. Persentase rumah tangga yang menerima bantuan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan masing-masing sebesar 11,39 persen dan 12,66 persen. Selama satu tahun terakhir sebanyak 88,26 persen rumah tangga yang masih tercatat penerima PKH memanfaatkan bantuan PKH untuk belanja pangan. Selain itu, persentase rumah tangga penerima PKH yang memanfaatkan bantuan untuk biaya sekolah sebanyak 43,81 persen; untuk biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga sebanyak 26,13 persen; untuk biaya pengobatan sebanyak 10,81 persen; pembayaran hutang/kredit sebanyak 3,05 persen; biaya perawatan ibu hamil sebanyak 1,49 persen; dan biaya lainnya 1,01 persen.

Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Masih Tercatat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pemanfaatan Bantuan di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Perlindungan Sosial (1)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan dan Perdesaan (4)
Belanja pangan	81,98	91,08	88,26
Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,98	25,76	26,13
Biaya pengobatan	6,54	12,72	10,81
Biaya perawatan ibu hamil	–	2,15	1,49
Biaya sekolah	55,06	38,76	43,81
Pembayaran hutang/kredit	NA	3,52	3,05
Biaya lainnya	NA	NA	1,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

8.3 Tindak Kejahatan

Salah satu elemen yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat adalah keamanan. Rasa aman dari tindak kejahatan merupakan salah satu indikator pendukung yang menjadi cerminan rakyat sejahtera dan juga salah satu aspek penyusun Indeks Kebahagiaan. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.

Tabel 8.6 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Kelamin	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	0,65	0,77	0,73
Perempuan	0,16	0,26	0,22
Laki-laki dan perempuan	0,41	0,52	0,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2024

Susenas 2024 mencatat kejadian kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya yang terjadi selama periode 1 Januari–31 Desember 2023. Sebanyak 0,48 persen penduduk menyatakan pernah menjadi korban kejahatan selama periode tersebut. Jika ditinjau menurut wilayah tempat tinggal, tingkat kejadian kejahatan di perdesaan tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki tercatat lebih banyak menjadi korban kejahatan dibandingkan penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko menjadi korban kejahatan tidak semata-mata berkaitan dengan faktor kerentanan gender, melainkan juga dipengaruhi oleh pola aktivitas, di mana laki-laki umumnya memiliki intensitas aktivitas di luar rumah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, P. A. 2014. *Densitas Energi Konsumsi, Status Gizi*. 9 (November), 187 – 194.
- Ansori, A., Yunitasari, B., Soeryanto, S., & Muhaji, M. 2020. *Model Hybrid Pembangkit Listrik Di Pedesaan*. *Otopro*, 13(2), 58. <https://doi.org/10.26740/otopro.v13n2.p58-62>.
- Multifiah. 2011. *Telah Kristis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi*. *Journal of Indonesia Applied Economics*. Vol.5 No.1 p. 1 - 27. Malang: Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta: BPS.
- Sanjoto, T. B. 2015. *Hubungan Antara Pengetahuan Rumah Sehat dan Status Sosial Ekonomi dengan Kualitas Rumah Tinggal Penduduk di Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*. *Edu Geography*. 3(3), 45–54.
- Taufik, N. A. 2011. *Gambaran Status Gizi Pada Lanjut Usia (Lansia)*. 59. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4222/1/NUR AMITA TAUFIK_opt.pdf.
- Tortajada, C., & Biswas, A. K. 2018. *Achieving universal access to clean water and sanitation in an era of + water scarcity: strengthening contributions from academia*. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 34, 21 - 25. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.08.001>.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. 0741-60497
Homepage: <https://www.jambi.bps.go.id>
Email: bps1500@bps.go.id

